

Determinan Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Karyani Safitri¹, Mochamad Agung Sasongko^{2*}

¹Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta

²Universitas Indonesia

email: ²⁾ masasongko@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 12 - 12, 2024

Revised : 10 - 01, 2025

Accepted : 20 - 01, 2025

Keywords:

State Budget Implementation;
Timeliness of Financial
Reporting;
Information Technology
Utilization;
Human Resource Competence;
Internal Control.

ABSTRACT

In its implementation, the State Budget (APBN) must be carried out in an orderly manner, adhering to laws and regulations, while being productive, economical, effective, transparent, and responsible. Therefore, it is necessary to prepare timely reports on the utilization of the APBN, aligning with the principle of timeliness in reporting. The objective of this research is to analyze how the use of information technology, the competence of employees, and internal controls impact the promptness of financial reporting. A quantitative method is employed in this study. The object of this research is the Persons in Charge (PIC) responsible for preparing and compiling financial accountability reports at the Corruption Eradication Commission (KPK). The primary data were collected through questionnaires. The study involved 90 respondents out of a total population of 117, selected using purposive sampling. Data analysis was conducted using validity tests, reliability tests, normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, multiple linear regression analysis, t-tests, f-tests, and R-square tests, utilizing IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 27. The results show that the utilization of information technology, human resource competence, and internal control positively and significantly influence the timeliness of financial accountability reporting. This study is limited to the work unit of the Corruption Eradication Commission (KPK), suggesting that results may vary if conducted in other government work units.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Mochamad Agung Sasongko
Universitas Indonesia
Email: masasongko@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Saat ini, kemajuan sektor publik di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam permintaan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melaksanakan program mereka. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dokumen keuangan tahunan yang telah disahkan oleh DPR dan berisi informasi mengenai pendapatan serta pengeluaran pemerintah dalam satu tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi APBN mencakup otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi dana negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu Lembaga negara yang sudah seharusnya mematuhi ketentuan pelaksanaan penggunaan APBN dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dimana segala bentuk kegiatan dalam proses penyampaian anggaran akan dilampirkan dalam bentuk laporan

pertanggungjawaban (LPJ) keuangan. Dimana didalamnya memuat realisasi belanja yang dibuat sebagai wujud responsibilitas dan transparansi dalam birokrasi pemerintah. Namun, seringkali ada berbagai faktor yang dapat menghalangi ke tepatanketika laporan keuangan akuntabilitas disampaikan tepat waktu. Data keterlambatan LPJ disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Data keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan KPK tahun 2020-2021

No.	Unit Kerja	Jumlah LPJ	Terlambat	Persentase
1	Sekretariat Jenderal	462	112	24,2%
2	Penindakan	757	420	55,5%
3	Pencegahan dan Monitoring	451	149	33%
4	Informasi dan Data	190	19	10%
5	Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat	104	6	5,8%
6	Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	154	0	0%
7	Koordinasi dan Supervisi	75	10	13,3%
8	Inspektorat	1	0	0%
9	Sekretariat Dewan Pengawas	0	0	0

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) belum berjalan dengan baik karena masih adanya keterlambatan dalam penyampaian LPJ tersebut. Dari 9 (Sembilan) unit kerja yang ada di KPK, ternyata sebagian besar masih terlambat dalam menyampaikan LPJ. Beberapa hal yang bisa berdampak pada kelancaran pengiriman laporan keuangan adalah penggunaan teknologi, kemampuan karyawan, dan kontrol internal.

Demi meningkatkan kepatuhan penyampaian LPJ dengan ketentuan yang berlaku serta dalam rangka upaya untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian LPJ maka perlu mengetahui faktor-faktor yang menjadi permasalahan terkait ketepatan waktu penyampaian LPJ tersebut. Oleh karena itu, sang penulis merasa tertarik untuk mengadakan studi dengan judul “Determinan Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang penelitian, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi. Pertama, penyusunan satu dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan kegiatan yang sama memerlukan tiga aplikasi berbeda, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama dari seharusnya. Kedua, sebagian besar pegawai belum memahami prosedur dalam penyusunan LPJ keuangan. Ketiga, terdapat kesenjangan antara implementasi Standar Operasional Prosedur pertanggungjawaban keuangan dengan pelaksanaan di lapangan. Keempat, penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi terkait faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan pengiriman LPJ, termasuk teknologi informasi, keterampilan SDM, dan kontrol internal. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan apakah teknologi informasi, keterampilan SDM, dan kontrol internal berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengiriman LPJ secara individu atau bersamaan.

Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan Uang Persediaan (UP) untuk kegiatan swakelola/non-kontraktual serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyampaian LPJ, yaitu pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi dampak variabel-variabel tersebut terhadap keteraturan dalam pelaporan keuangan. Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori terkait pengelolaan anggaran publik dan memberikan solusi yang berguna bagi praktisi dan akademisi. Bagi penulis, penelitian ini memberikan wawasan empiris dan pengalaman. Bagi instansi, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan terkait teknologi informasi dan pengendalian internal. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi literatur pendukung bagi penelitian berikutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori dan Dasar Hukum

Menurut Indra Bastian dalam Machfuda & Kustiningsih (2021) mendefinisikan SPJ sebagai komponen dari sistem akuntansi pemerintah daerah yang menjelaskan tentangnya. SPJ pengeluaran adalah catatan detail dari penggunaan kas yang dilengkapi dengan bukti transaksi pengeluaran.

Definisi SPJ menurut LAN & BPKP dalam Machfuda & Kustiningsih (2021) yaitu dokumen penting yang dibuat oleh bendahara untuk melaporkan penggunaan APBN dan memastikan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan. SPJ bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi tentang pengeluaran dana negara.

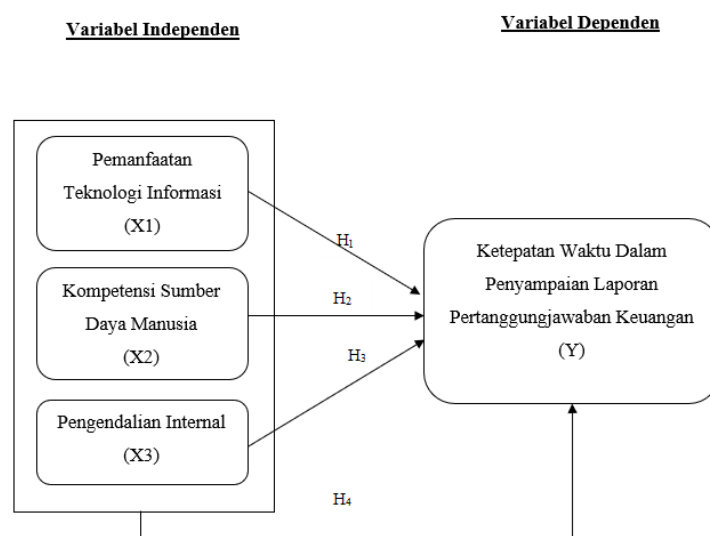
Pada pengertian umum di KPK yang penulis ketahui, SPJ atau lebih dikenal dengan LPJ adalah laporan pertanggungjawaban yang memuat bukti-bukti pembayaran asli dan disusun secara terperinci. Dokumen LPJ ini berkaitan dengan kelengkapannya administrasi dalam pertanggungjawaban atas keuangan yang dikelola serta implementasi dari penggunaan dana dalam suatu program atau proyek. Fungsi dari penyusunan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana upah muka oleh penerima dana tersebut saat menjalankan proyek tertentu

Dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) adalah laporan yang mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran atas suatu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu unit dan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah. Menurut Nirmawati (2021), fungsi dari SPJ adalah sebagai:

- Penentuan kebijakan dan panduan dari para pimpinan.
- Materi yang digunakan untuk membuat rencana kegiatan selanjutnya.
- Sebagai alat evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan serta hasil yang diperoleh dari kegiatan yang sudah dilakukan.
- Digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan di masa depan.
- Sebagai sarana informasi mengenai perkembangan suatu kegiatan.

Menurut Gregory dan Van Horn dalam Arif & Anita (2018), ketepatan waktu secara konseptual adalah kemampuan untuk memberikan informasi dengan tepat pada waktu yang diinginkan atau kualitas informasi yang baik dalam hal waktu. Chambers dan Penman dalam Kristianto & Apriwenni (2018) mengartikan ketepatan waktu dalam dua bentuk, yakni sebagai keterlambatan dalam presenting laporan keuangan dan sebagai ketepatan waktu presenting laporan relatif terhadap target yang ditentukan. Selain itu, Dyer dan Mc Hugh dalam Yunita (2017) mengatakan ada tiga faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan, yaitu *preliminary lag*, *auditor's report lag*, dan *total lag*. *Preliminary lag* adalah jeda waktu antara penyelesaian laporan keuangan dan penerimaan laporan akhir. *Auditor's report lag* adalah jarak waktu antara selesainya laporan keuangan dan penandatanganan laporan auditor. Selain itu, *total lag* adalah jarak waktu antara periode laporan keuangan dan pengiriman laporan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap adalah batas waktu pertanggungjawaban uang muka kegiatan adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketepatan waktu (*timeliness*) penyampaian LPJ/SPJ adalah jangka waktu penyampaian LPJ/SPJ dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan uang muka kegiatan sebelum 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

H1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

H3 : Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

H4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Internal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

2.2. Gambaran Umum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga nasional yang dibentuk untuk memberantas korupsi, didirikan pada era Megawati Soekarnoputri dengan dasar UU No. 30 Tahun 2002 yang diperbarui menjadi UU No. 19 Tahun 2019. KPK memiliki 5 tugas utama dan 29 kewenangan, termasuk koordinasi, supervisi, penyelidikan, hingga pengadilan, melibatkan partisipasi masyarakat sesuai hukum yang berlaku. KPK adalah sebuah badan pemerintah yang bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik manapun. Tugas utama KPK adalah tidak hanya untuk memberantas tindak korupsi, tetapi juga untuk mendorong lembaga lain agar lebih efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Pimpinan KPK terdiri dari lima orang, yaitu satu ketua merangkap anggota dan empat wakil ketua yang juga merupakan anggota. Masa jabatan mereka berlangsung selama empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Dalam membuat keputusan, mereka bekerja secara kolektif dan kolegial. Dalam usahanya untuk menekan dan menghindari korupsi, KPK selalu mematuhi pandangan, tujuan, dan harapan KPK yang mencakup legalitas, transparansi, pertanggungjawaban, kepentingan rakyat, keseimbangan, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Fokus KPK adalah bersama masyarakat mengurangi korupsi untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Sementara tujuan KPK adalah meningkatkan langkah-langkah pencegahan dengan memperbaiki sistem manajemen administrasi badan pemerintah dan yang anti-korupsi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka diperkuatnya peran pencegahan serta dibentuknya unsur Dewan Pengawas menjadi kekuatan baru bagi KPK. Dewan Pengawas sesuai tugasnya sesuai undang-undang, menyempurnakan nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku KPK supaya berkesesuaian dengan tuntunan perkembangan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai dasar KPK yang baru dan harus diterapkan oleh pegawai KPK dalam melaksanakan tugasnya terdiri atas nilai Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan, yang kemudian disingkat menjadi "IS KPK".

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner penelitian kepada para PIC yang telah ditunjuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) sebagai pembuat dan penyusun LPJ dengan jumlah sampel sebanyak 90 orang dari total populasi PIC pembuat dan penyusun LPJ di KPK yang berjumlah 117 PIC. Dari 90 kuesioner penelitian yang disebar, kuesioner penelitian yang kembali sebanyak 90 kuesioner. Data tersebut disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kuesioner disebar	90	100%
2	Kuesioner kembali	90	100%
3	Kuesioner tidak kembali	0	0

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti, 2022

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi mengenai ciri-ciri partisipan berdasarkan gender bisa terlihat di tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	33	37%
2	Perempuan	57	57%
Total		90	100%

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti, 2022

Informasi mengenai tingkat pendidikan responden telah dianalisis dan ditampilkan dalam tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	2	2%
2	Diploma III (D3)	27	30%
3	Strata I (S1)	58	65%
4	Pasca Sarjana (S2/S3)	3	3%
Total		90	100%

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti, 2022

Di bawah ini disajikan tabel hasil survei mengenai respons dari peserta penelitian terhadap pertanyaan tentang penggunaan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, kontrol internal, dan keakuratan pengiriman laporan keuangan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Frekuensi Analisis Deskriptif

Skala Linkert	Descriptive Statistics									
	1		2		3		4		5	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)										
X1.1			1	1,1	6	6,7	42	46,7	41	45,6
X1.2			4	4,4	24	26,7	41	45,6	21	23,3
X1.3	1	1,1			3	3,3	41	45,6	45	50,0
X1.4			4	4,4	8	8,9	42	46,7	36	40,0
X1.5	1	1,1	4	4,4	8	8,9	49	54,4	28	31,1
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)										
X2.1			3	3,3	13	14,4	50	55,6	24	26,7
X2.2			3	3,3	12	13,3	48	53,3	27	30,0
X2.3			1	1,1	2	2,2	36	40,0	51	56,7
X2.4	2	2,2	8	8,9	22	24,4	29	32,2	29	32,2
X2.5			1	1,1	4	4,4	41	45,6	44	48,9
Pengendalian Internal (X3)										
X3.1			2	2,2	15	16,7	43	47,8	30	33,3
X3.2					4	4,4	47	52,2	39	43,3
X3.3			1	1,1	12	13,3	51	56,7	26	28,9
X3.4			2	2,2	9	10,0	39	43,3	40	44,4
X3.5			2	2,2	8	8,9	44	48,9	36	40,0
Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (Y)										
Y.1	2	2,2	1	1,1	5	5,6	40	44,4	42	46,7
Y.2					2	2,2	31	34,4	57	63,3
Y.3					2	2,2	36	40,0	52	57,8

Sumber : Data primer diolah Statistik IBM SPSS Versi 27, 2022

4.1. Hasil Analisis

Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KW = \alpha + \beta_1PTI + \beta_2KSDM + \beta_3PI + \varepsilon$$

Keterangan:

KW	= Ketepatan Waktu
α	= Konstanta
$\beta_1 -- \beta_3$	= Koefisien Regresi Variabel Dependen
PTI	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
KSDM	= Kompetensi Sumber Daya Manusia
PI	= Pengendalian Internal
ε	= Error atau variabel diluar model

Untuk membentuk persamaan regresi dalam penelitian ini diperlukan nilai koefisien regresi yang diuji melalui IBM SPSS versi 27 dan tersaji pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,923	1,245		5,559	0,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	0,058	0,068	0,098	0,852	0,397
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,124	0,078	0,245	1,591	0,115
Pengendalian Internal (X3)	0,130	0,084	0,242	1,552	0,124

Sumber : Data primer diolah Statistik IBM SPSS Versi 27, 2022

Menurut hasil analisis regresi linear yang tercantum dalam tabel 6, diperoleh rumus sebagai berikut:

$$KW = 6,923 + 0,058PTI + 0,124KSDM + 0,130PI + \varepsilon$$

Dari formula yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai α memiliki dampak positif, menunjukkan bahwa variabel independen seperti penggunaan teknologi informasi, kompetensi SDM, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Angka regresi untuk variabel penggunaan teknologi informasi adalah 0,058 terhadap ketepatan waktu dalam pengiriman laporan keuangan. Jika penggunaan teknologi informasi meningkat satu poin, maka kemungkinan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,058 atau 5,8%.

Nilai koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan adalah sebesar 0,124. Jika variabel pemanfaatan teknologi informasi naik satu poin, maka ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga akan naik sebesar 0,124 atau 12,4%.

Kemudian, angka koefisien untuk regresi variabel internal control adalah 0,130 terhadap variabel keakuratan waktu dalam pengiriman laporan pertanggungjawaban keuangan. Angka koefisien regresi ini berarti jika variabel penggunaan teknologi informasi naik satu poin, maka keakuratan waktu dalam pengiriman laporan pertanggungjawaban keuangan akan meningkat sebesar 0,130 atau 13%.

4.2. Pembahasan

Hasil uji signifikan simultan (uji f) dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa f hitung memiliki nilai sebesar 10,961 yang lebih besar daripada f tabel yang sebesar 2,71 dan signifikansinya adalah 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05. Data dari uji f ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, serta pengendalian internal secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Uji coba tersebut membuktikan bahwa agar laporan keuangan dapat disampaikan tepat waktu dengan signifikan, tidak cukup hanya mengandalkan satu faktor saja, tetapi harus ada dukungan dari ketiga faktor tersebut secara kolektif.

Uji coba ini mendukung temuan dari penelitian Sawitri et al. (2019) yang menunjukkan bahwa faktor manusia, penggunaan teknologi informasi, dan pengendalian internal memiliki dampak yang signifikan pada ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Dalam rangka meningkatkan ketepatan waktu dalam

penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan KPK, maka dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, KPK harus membangun suatu aplikasi yang terintegrasi untuk penyelesaian LPJ secara efektif dan efisien. Perlunya pelatihan terkait APBN bagi para pembuat dan penyusun LPJ diharapkan akan mampu meningkatkan kompetensi SDM-nya.

Demikian juga dengan penguatan terhadap pengendalian internal diharap dapat mampu meningkatkan. Perlunya pendefinisian wewenang dan tanggungjawab yang jelas terhadap para PIC pembuat dan penyusun LPJ diharapkan dapat membuat para PIC fokus terhadap penyelesaian penyusunan LPJ. Kemudian perlu ditingkatkannya kembali monitoring atasan terhadap penyelesaian LPJ, perlu adanya pengingat dengan menggunakan Kartu Pengawasan (Karwas), serta sosialisasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait LPJ demi terciptanya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan KPK.

4.2.1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Hasil regresi liner berganda menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan dampak positif. Ini berarti penggunaan teknologi informasi mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Namun, hasil uji statistik t menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian ini mendukung temuan Burhanuddin dan Yanto (2018) yang menyatakan bahwa teknologi informasi tidak signifikan memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan desa. Sebaliknya, beberapa penelitian, seperti Jaenudin (2019), Yustanti & Susanti (2020), dan Amelia Fahmadani (2024), menemukan pengaruh positif teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan. Dewayani et al. (2017), Fitriani (2017) dan Anshori (2018) juga mengidentifikasi pengaruh positif dan signifikan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Temuan serupa disampaikan oleh Shentya et al. (2019) di Kabupaten Manokwari dan Hikmatun (2020) pada pemerintah desa. Namun, Waris et al. (2021) menyimpulkan bahwa teknologi informasi bukan faktor utama keterlambatan laporan perjalanan dinas.

Teknologi informasi ialah serangkaian perangkat yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan pikiran yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas terkait pengolahan data menjadi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah tindakan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan pekerjaan guna meningkatkan efisiensi. Andrianto & Rahmawati (2018) berpendapat bahwa penggunaan teknologi informasi berarti memanfaatkan berbagai peralatan untuk mendukung pengolahan informasi. Penggunaan teknologi informasi melibatkan hardware, software, netware, dataware, dan brainware untuk mempercepat proses pengolahan data dan distribusi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi di KPK telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan pembuatan LPJ. Saat ini KPK menggunakan aplikasi intranet Selayar Renkeu dan aplikasi SAKTI sesuai dengan aturan Kemenkeu. Namun pemanfaatan teknologi informasi ini masih harus disempurnakan kembali demi tercapainya efisiensi waktu dalam pengerjaan laporan pertanggungjawaban keuangan keuangan, sehingga penyampaian LPJ ke BPP dapat tepat waktu. Apabila efisiensi dalam pemanfaatan teknologi ini dapat ditingkatkan, maka ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di KPK akan semakin meningkat.

4.2.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Berdasarkan analisis regresi berganda, ternyata kompetensi sumber daya manusia memiliki dampak positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Tetapi, uji statistik t menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi sumber daya manusia tidak signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Ermayanti (2016), Oktyawati & Fajri (2019), Fadhillah & Ikhsan (2020), serta Yustanti & Susanti (2020), yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal serupa diungkapkan oleh Amelia Fahmadani (2024). Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil berbeda. Yanto & Burhanuddin (2018), Hikmatun (2020), dan Anshori (2018) menyatakan bahwa SDM tidak signifikan memengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan, sementara Jaenudin (2019) menemukan pengaruh negatif. Sebaliknya, penelitian Fitriani (2017), Shentya et al. (2019), dan Machfuda & Kustiningsih (2021) menemukan pengaruh signifikan dan positif kualitas SDM terhadap ketepatan waktu laporan keuangan dalam berbagai konteks. Waris et al. (2021) menyimpulkan bahwa SDM bukan faktor utama keterlambatan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Kompetensi merupakan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas kerja dengan baik. Kemampuan ini tidak hanya bergantung pada pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dengan demikian, kompetensi memperlihatkan keahlian dan pengetahuan yang menandai seorang profesional dalam suatu bidang khusus sebagai hal yang paling penting, menjadi keunggulan dalam bidang tersebut (Wibowo, 2013). Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, maka akan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien.

Untuk mendukung keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan KPK, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan para PIC yang bertanggung jawab dalam penyusunan LPJ. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan tersebut adalah melalui pelatihan secara terus-menerus agar para PIC selalu memiliki pengetahuan terbaru dalam penyusunan LPJ. Hal lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di KPK yaitu dengan sosialisasi aturan-aturan terbaru yang berlaku dalam pembuatan dan penyusunan LPJ. Apabila hal-hal tersebut dapat terealisasi, maka kompetensi sumber daya manusia dalam pembuatan dan penyusunan LPJ akan meningkat sehingga akan meningkatkan pula ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan di KPK.

4.2.3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Pengujian variabel kontrol internal terhadap keakuratan waktu dalam penyusunan laporan keuangan dengan regresi linier ganda menunjukkan hasil yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol internal berpengaruh positif terhadap keteraturan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Tetapi pengujian hipotesis dengan uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kontrol internal secara sebagian tidak signifikan berpengaruh terhadap keakuratan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Temuan studi ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Oktyawati & Fajri (2019) yang menyatakan bahwa pengendalian internal akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Amelia Fahmadani (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Ermayanti (2016) yang menyatakan bahwa pengendalian internal akuntansi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Begitupula dengan penelitian Fitriani (2017) yang menyatakan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas. Yanto & Burhanuddin (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan desa. Penelitian Walyono et al. (2019) menyatakan bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu. Waris et.al (2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengendalian intern bukannya penyebab keterlambatan pembuatan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pengendalian internal bertujuan memastikan kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Menurut COSO (The Committee of Sponsoring Organizations), pengendalian internal adalah proses yang melibatkan direksi, manajemen, dan seluruh personel organisasi, dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan terkait operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian internal merupakan proses integral yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, andal dalam pelaporan keuangan, melindungi aset negara, dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban di KPK, maka praktek pengendalian intern harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara terus menerus. Salah satu praktek pengendalian internal terkait dengan proses penyampaian LPJ secara tepat waktu adalah dengan gencar mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan laporan pertanggungjawaban keuangan. Dengan semakin meningkatkan pengendalian internal, maka akan semakin meningkat pula ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban di KPK.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling, di mana data diperoleh melalui kuesioner elektronik menggunakan Google Form serta kuesioner langsung kepada responden. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi statistik IBM SPSS versi 27 untuk mengolah data kuantitatif yang terkumpul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal masing-masing memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan secara parsial. Meski demikian, pengendalian internal yang efektif, kompetensi SDM yang ditingkatkan melalui pelatihan, serta optimalisasi teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu pelaporan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, menegaskan bahwa peningkatan ketepatan waktu pelaporan memerlukan sinergi dari semua faktor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Fahmadani, F. (2024). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Kualitas Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan*. Universitas Wijayakusuma.
- Andrianto, E., & Rahmawati, D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja P. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(2).
- Anshori, M. A. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 66–77.
- Arif, E. M., & Anita, S. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Debt To Equity Ratio Dan Kepemilikan Publik Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2011-2016. *JURNAL MANAJEMEN FE-UB*, 6(1A), 128–148.
- Dewayani, M. A., Dewi, V. S., & Al Amin, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016). *URECOL*, 441–458.
- Ermayanti, D. (2016). The Impact Of Human Resources Competence, Information Technology Utilization, Financial Supervision And Accounting Internal Control To Timeliness Of Financial Reporting In Jombang Public Hospital. *Revitalization Of Professional Association And Scientific Knowledge For Hrd Of Higher Education*, 420.
- Fitriani, R. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Ketepatan Waktu (Timeliness) Laporan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Bara. *MAKSI UNTAN*, 4(1).
- Jaenudin, J. (2019). Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Serta Pengaruhnya Pada Kinerja Keberlanjutan Keuangan (Studi Pada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (Pkbi)). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(1), 1–26.
- Kristianto, W., & Apriwenni, P. (2018). Pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan dan opini audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 5(2), 224–252.
- Machfuda, M. K., & Kustiningsih, N. (2021). E. Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Laporan SPJ Pengeluaran (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur). *Economics and Sustainable Development*, 6(1), 53.
- Nirmawati. (2021). Analisis Faktor Penghambat Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Oktyawati, D., & Fajri, F. A. (2019). The influence of accounting internal control and human resources capacity on reliability and timeliness of regional government financial reporting (a study in Special Region of Yogyakarta Province). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(4), 525–534.
- Sawitri, E., Astiti, M. S., & Fitriani, Y. (2019). Hambatan dan tantangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgrri Palembang*.
- Walyono, T. M., Nugroho, R., & Sumiati, S. (2019). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja Terhadap

- Kompetensi Karyawan Sera Implikasinya Terhadap Kinerja Karyawan. *Management & Accounting Research Journal Global*, 4(1).
- Wibowo. (2013). *Manajemen Kinerja. edisi ketiga*. Rajawali Pers.
- Yanto, Y., & Burhanuddin, B. (2018). Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Kembang, Bangsri Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2(1), 53–67.
- Yunita, T. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yng Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Teraftar di BEI Periode 2012-2015)*.
- Yustanti, N. V., & Susanti, M. (2020). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(5), 1043–1052.